


I.1 LATAR BELAKANG

 etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Perencanaan dan Program, sebagai salah satu unit di bawah Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Laporan Kinerja disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bagian Perencanaan dan Program memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

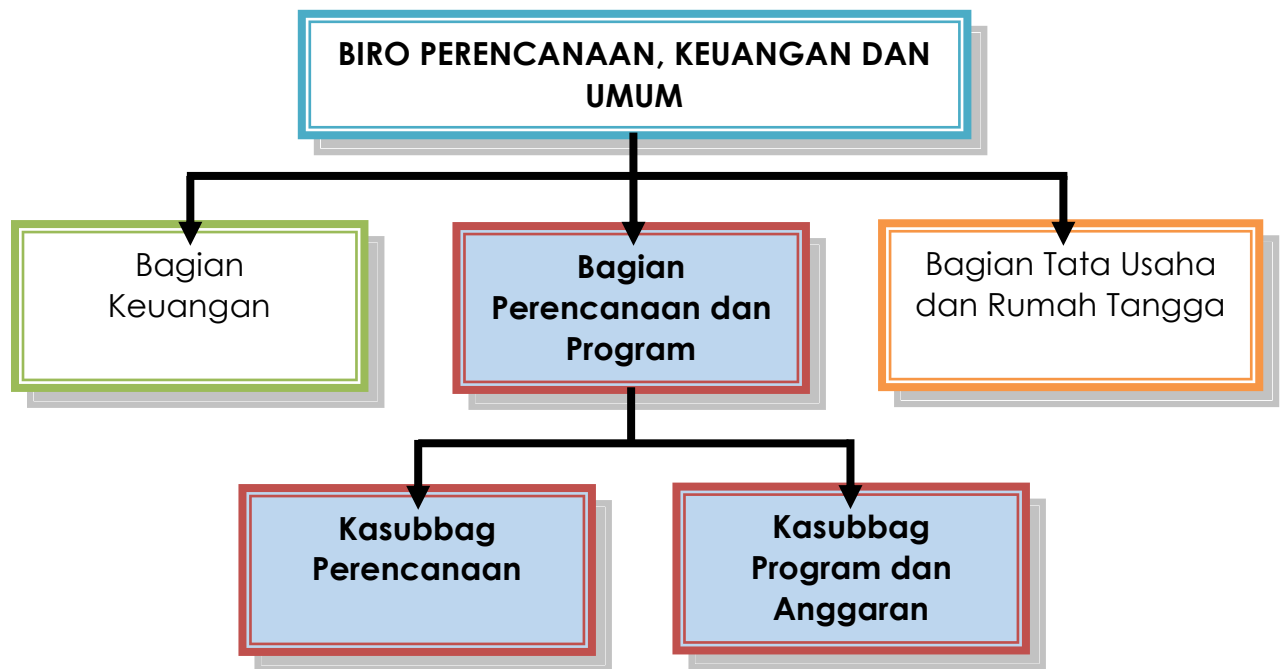
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bagian Perencanaan dan Program adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan anggaran di bidang standardisasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program standardisasi, serta penyusunan laporan.

Struktur Bagian Perencanaan dan Program dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Program

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 Subbagian terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan, dengan tugas melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyiapan penyusunan rencana dan kegiatan.
2. Subbagian Program dan Anggaran, dengan tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 Bagian Perencanaan dan Program memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.2
Personel ASN Bagian Perencanaan dan Program

1	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Kepala Bagian Perencanaan dan Program		1		1
2.	Subbagian Perencanaan		3	1	4
	- Kepala Subbagian			1	1
	- JFK Perencana Pertama		2		2
	- Analis Perencana		1		1
3.	Subbagian Program dan Anggaran		5	1	6
	- Kepala Subbagian			1	1
	- JFK Perencana Muda		1		1
	- JFK Perencana Pertama		3		3
	- Pengadministrasi Perencanaan & Program		1		1
	Jumlah	-	9	2	11

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Biro PKT mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu dengan menjalankan peran penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan penyediaan sarana prasarana. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Perencanaan dan Program telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.3
Potensi dan Permasalahan Bagian Perencanaan dan Program

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja yang sudah mendapatkan nilai baik (B) dari KemenPANRB	<ul style="list-style-type: none">▪ Anggaran kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) masih terbatas▪ Kinerja BSN masih belum optimal dan belum terukur pencapaiannya dengan tepat	<ul style="list-style-type: none">▪ Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan program antar K/L▪ Pengusulan penambahan anggaran melalui flagship▪ Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

“Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel”

MISI

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro PKT telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro PKT adalah sebagai berikut :

TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga.
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN.

Rumusan tujuan ini telah dilakukan penyempurnaan dari tujuan yang sebelumnya tertuang dalam Renstra Biro PKT 2015-2019.

Sasaran merupakan sasaran di lingkungan Biro PKT selaku Unit Pendukung yang memberikan layanan kepada Unit Teknis di lingkungan BSN. Biro PKT dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Biro PKT telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

SASARAN

1. Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang profesional
2. Meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima di lingkungan BSN
3. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran
5. Meningkatkan kualitas penerapan e-govt
6. Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran
7. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel
8. Meningkatkan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
9. Meningkatkan pengelolaan uang persediaan dan penerimaan negara
10. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Biro PKT
11. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Biro PKT
12. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Biro PKT
13. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Biro PKT

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro PKT sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2018

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
Stakeholder Perspectives			
1.	Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang profesional	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB) Nilai
2.	Meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima di lingkungan BSN	2. Indeks kepuasan layanan internal	3.4 Nilai
3.	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja	3. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100 %
		4. % Pemanfaatan BMN	100
4.	Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	5. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP Opini
		6. % Realisasi Anggaran	≥95 %
		7. % Peningkatan PNBPN	10 %
Internal Process Perspectives			
5.	Meningkatkan kualitas penerapan e-govt	8. Indeks kepuasan penerapan e-govt	3 skor
6.	Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran	9. % Pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu	100 %
		10. % Unit kerja yang menyampaikan Laporan	60%

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
		Kinerja tepat waktu	
7.	Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel	11. % pengajuan anggaran baseline BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif	90%
		12. % pemenuhan kriteria pengawasan keuangan negara	100 %
8.	Meningkatkan pengelolaan tata usah dan rumah tangga	13. % Barang Milik Negara yang terinventarisir (perencanaan s.d pemanfaatan)	100%
		14. % penyelesaian lelang paket pekerjaan	100 %
9.	Meningkatkan pengelolaan uang persediaan dan penerimaan negara	15. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	150 kali
		16. % Realisasi target penerimaan PNB	100 %
Learning and Growth Perspectives			
10.	Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Biro PKT	17. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	83 Nilai
		18. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70 (BB) Nilai
11.	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Biro PKT	19. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %
		20. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	1 Orang
12.	Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Biro PKT	21. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100 %
		22. % Pemanfaatan BMN	100 %
13.	Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Biro PKT	23. % Realisasi Anggaran	≥95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dimana setiap sasaran memiliki

indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro PKT telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018

Sasaran		Indikator Kinerja		Target 2018
1	Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran	1	Jumlah draft Renja BSN	1 Dokumen
		2	Jumlah draft Laporan Kinerja BSN (BSN, Sestama, Biro PKT)	3 Laporan
		3	Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN (BSN, Ess I-IV)	1 Dokumen
		4	Jumlah draft Laporan Monev BSN (monev bulanan dan triwulan)	16 Laporan
			Jumlah draft rewiu IKU/ Renstra BSN	1 Dokumen
2	Meningkatkan pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	3	Jumlah draft DIPA BSN	1 Dokumen
		4	Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4 Dokumen

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun rincian output dan komponen yang dihasilkan oleh Bagian Perencanaan dan Program untuk melaksanakan kegiatan di Biro PKT adalah sebagai berikut:

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BSN, melalui kegiatan :

3550 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, yang akan menghasilkan output yang terkait dengan Bagian Perencanaan dan Program, yaitu :

Output : **3550.952 Layanan Perencanaan**

Komponen :

051. Melaksanakan Penyusunan Rencana Program

052. Melaksanakan Penyusunan Anggaran

053. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi

055. Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro PKT berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro PKT, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian Perencanaan dan Program yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018

Sasaran		Indikator Kinerja		Target 2018	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran	1	Jumlah draft Renja BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2	Jumlah draft Laporan Kinerja BSN (BSN, Sestama, Biro PKT)	3 Laporan	3 Laporan	100%
		3	Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN (BSN, Ess I-IV)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4	Jumlah draft Laporan Monev BSN (monev bulanan dan triwulan)	16 Laporan	16 Dok	100%
		5	Jumlah draft reuiu IKU/ Renstra BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Meningkatkan pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	6	Jumlah draft DIPA BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		7	Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4 Dokumen	6 Dok	50%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran
----------------------	--

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
1	Jumlah draft Renja BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
2	Jumlah draft Laporan Kinerja BSN (BSN, Sestama, Biro PKT)	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	
3	Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN (BSN, Ess I-IV)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
4	Jumlah draft Laporan Monev BSN (monev bulanan dan triwulan)	16 Laporan	16 Dok	100%	16 Dokumen	
5	Jumlah draft reuiu IKU/ Renstra BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah draft Renja BSN; (2) Jumlah draft Laporan Kinerja BSN (BSN, Sestama, Biro PKT); (3) Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN (BSN, Ess I-IV); (4) Jumlah draft Laporan Monev BSN (monev bulanan dan triwulan); (5) Jumlah draft reuiu IKU/ Renstra BSN. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program

Tabel III.3
Renja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2019

Kode	Output/Komponen	Pagu 2019
3550.952	Layanan Perencanaan	2,800,000,000
51	Melakukan Penyusunan Rencana Program	1,268,652,000
52	Melakukan Penyusunan Anggaran	696,538,000
53	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	709,980,000
55	Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja (Laporan Kinerja)	124,830,000

Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2018, Bagian Perencanaan dan Program menyusun 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2019. Sejak tahun 2018, penyusunan Rencana Kerja (Renja) suatu K/L adalah berbasis aplikasi yang terintegrasi yaitu KRISNA dari Bappenas.

- Sesuai dengan target yang diharapkan, Bagian Perencanaan dan Program berhasil menyusun 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2019.

- Penyusunan 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program ini berhasil dilakukan 100% karena didukung oleh terlaksananya tahapan-tahapan penyusunan dokumen dengan baik dan lancar.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program menggunakan krisna.bappenas.go.id



2. Jumlah draft Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Pada tahun 2018, Bagian Perencanaan dan Program telah berhasil menyiapkan 3 (tiga) draft Laporan Kinerja Tahun 2017 yang disusun secara berjenjang mulai dari penyusunan draft Laporan Kinerja Biro PKT, draft Laporan Kinerja Sekretaris Utama, dan terakhir draft Laporan Kinerja BSN, sehingga capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%.

Dalam rangka penyusunan draft Laporan Kinerja tersebut Bagian Perencanaan dan Program melakukan koordinasi dengan Tim AKIP untuk penyusunan Laporan Kinerja BSN, sedangkan untuk penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama.

- Capaian kinerja yang dicapai untuk jumlah draft laporan kinerja adalah 100%, dikarenakan realisasi sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 3 (tiga) draft laporan kinerja, antara lain: draft laporan kinerja BSN, draft laporan kinerja eselon I (Sestama), dan draft laporan kinerja eselon II (Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha).
- Keberhasilan Capaian 100% terhadap jumlah draft laporan kinerja ini dikarenakan oleh ketepatan waktu setiap bagian/unit kerja mengumpulkan laporan kinerja bagian/unit kerja masing-masing untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai draft laporan kinerja untuk eselon II dan eselon I, serta draft laporan kinerja BSN Tahun 2017.



3. Jumlah draft laporan monev BSN tahun 2018

- Target dokumen laporan monitoring dan evaluasi BSN pada Tahun 2018 yaitu 16 dokumen laporan terdiri dari 4 laporan monitoring dan evaluasi BSN Triwulan I,II,III,IV, 12 dokumen laporan monitoring dan evaluasi Kegiatan BSN dalam 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember . Realisasi dokumen laporan monitoring dan evaluasi BSN pada Tahun 2018 yaitu 16 dokumen laporan artinya tercapai sebesar 100%. Realisasi kinerja tahun ini yaitu 16 dokumen laporan monitoring dibandingkan tahun sebelumnya 16 dokumen yaitu sebesar 100%.

4. Jumlah draft revidi Renstra/IKU BSN

Revidi Renstra BSN termasuk revidi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan seluruh Ess I dan II dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Renstra/IKU dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ke depan. Salah satu masukan penting untuk menyempurnakan Renstra/IKU ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN RB. Perubahan tersebut menghasilkan 1 dokumen Keputusan Kepala BSN No 109/KEP/BSN/5/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala BSN No.28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional

SASARAN 2	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel
----------------------	--

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
1	Jumlah draft DIPA BSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
2	Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4 Dokumen	6 Dokumen	50%	6 Dokumen	

1. Jumlah draft DIPA BSN

Target draft DIPA BSN pada Tahun 2018 yaitu 1 dokumen laporan terdiri dari pengisian aplikasi KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah), Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Tahun 2017 artinya tercapai sebesar 100%.

2. Jumlah draft revisi anggaran eksternal

Pada T.A 2018 Bagian Perencanaan menetapkan target revisi anggaran (revisi RKAKL T.A BSN 2018) sebanyak 4 kali. Revisi anggaran tersebut untuk mengakomodir perubahan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran, baik yang bersifat internal BSN, maupun kebijakan pemerintah. Target 4 kali revisi anggaran diharapkan dapat dipenuhi oleh seluruh unit kerja BSN, sehingga seluruh kegiatan maupun program kerja dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam implementasinya, pada T.A 2018 terdapat 6 kali revisi RKAKL BSN T.A 2018 yang ke Kementerian Keuangan. Revisi yang terjadi melebihi target yang sudah ditentukan oleh Bagian Perencanaan sebanyak 4 kali. Adapun jenis revisi tersebut adalah sebagai berikut :

- Revisi 1 disetujui pada tanggal 16 Januari 2018

Revisi 1 merupakan revisi yang dilakukan BSN untuk membuka blokir pagu alokasi anggaran T.A 2018 dan dalam rangka penyampaian nomor register proyek SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) untuk Pembangunan Laboratorium SNSU (Standar Nasional Satuan Ukuran). Pada revisi ini terjadi pembukaan blokir pagu anggaran serta perubahan Hal. III DIPA BSN 2018.

- Revisi 2 disetujui pada tanggal 01 Maret 2018

Revisi ke 2 adalah revisi karena adanya perubahan target volume keluaran (*output*) dan perubahan jenis belanja antar keluaran, antar kegiatan dalam satu satker. Revisi ini menyebabkan perubahan Hal.III DIPA BSN 2018.

- Revisi 3 disetujui pada tanggal 08 Agustus 2018

Revisi ini merupakan revisi karena adanya perubahan target volume keluaran (*output*) dan perubahan jenis belanja antar keluaran, antar kegiatan dalam satu satker. Revisi ini menyebabkan perubahan Hal.III DIPA BSN 2018.

- Revisi 4 disetujui pada tanggal 15 Oktober 2018

Revisi ini merupakan revisi karena adanya perubahan target volume keluaran (*output*) dan perubahan jenis belanja antar keluaran, antar kegiatan dalam satu satker. Revisi ini menyebabkan perubahan Hal.III DIPA BSN 2018.

- Revisi 5 disetujui pada tanggal 23 November 2018

Revisi ini dikarenakan adanya kelebihan target penerimaan yang direncanakan, perubahan pagu anggaran PNBPN, dan perubahan jenis belanja antar keluaran dalam satu kegiatan. Penerimaan PNBPN untuk keseluruhan BSN sudah melebihi target, sehingga penggunaan pagu BSN sebesar 88% dari penerimaan harus direvisi yang berakibat pada penambahan pagu BSN dari pagu sebesar Rp. 182.465.697.000 menjadi pagu sebesar Rp. 183.641.416.000. Secara keseluruhan, penambahan pagu tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan layanan yang bersumber dari PNBPN. Revisi menyebabkan perubahan pada Hal.III DIPA BSN.

- Revisi 6 disetujui pada tanggal 31 Desember 2018

Revisi ini dilakukan berdasarkan Perdirjen PB No. 3 tahun 2017. Setiap K/L diharuskan untuk melakukan pemutakhiran pagu alokasi

anggaran BSN T.A 2018. Pada akhir Desember 2018, BSN melakukan revisi POK yang menjadi kewenangan KPA ke Kanwil Perebendaharaan Jakarta untuk memutakhirkan data alokasi anggaran dalam DIPA 2018. Revisi menyebabkan perubahan pada Hal.III DIPA BSN.

Tabel III.5
Revisi Anggaran (DIPA) BSN Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Tanggal Pengesahan	Keterangan
DIPA Petikan Awal	Rp 182.465.697.000	05 Desember 2017	
DIPA Revisi 1	Rp 182.465.697.000	16 Januari 2018	Pembukaan Blokir Pagu Alokasi Anggaran dan Penyampaian Nomor Register Proyek SBSN
DIPA Revisi 2	Rp 182.465.697.000	01 Maret 2018	Perubahan target volume keluaran (<i>output</i>) dan perubahan jenis belanja antar keluaran, antar kegiatan dalam satu satker
DIPA Revisi 3	Rp 182.465.697.000	08 Agustus 2018	Perubahan target volume keluaran (<i>output</i>) dan perubahan jenis belanja antar keluaran, antar kegiatan dalam satu satker
DIPA Revisi 4	Rp 182.465.697.000	15 Oktober 2018	Perubahan target volume keluaran (<i>output</i>) dan perubahan jenis belanja antar keluaran, antar kegiatan dalam satu satker
DIPA Revisi 5	Rp. 183.641.416.000	23 November 2018	Penambahan pagu PNPB BSN T.A 2018
DIPA Revisi 6	Rp. 183.641.416.000	31 Desember 2018	Perdirjen PB No. 3 tahun 2017

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 31 Desember 2018, pagu anggaran Bagian Perencanaan dan Program TA 2018 adalah sebesar Rp 2,800,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.205.525.449 Sebesar 96,76%.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan Program TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.6
Pagu dan Realisasi Anggaran
Bagian Perencanaan dan Program TA 2018

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2018		%
		Pagu	Realisasi	
3550.952	Layanan Perencanaan	2.279.411.000	2.205.525.449	96,76%
51	Melakukan Penyusunan Rencana Program	751.420.000	750.476.500	
52	Melakukan Penyusunan Anggaran	776.775.000	760.348.629	
53	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	713.776.000	657.580.320	
55	Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja (Laporan Kinerja)	37.440.000	37.120.000	
	Jumlah	2.279.411.000	2.205.525.449	96,76%

Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro PKT.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018, hampir sebagian besar tercapai sesuai target atau rata-rata capaian sebesar 92,85%. Yang tidak tercapai hanya untuk indikator kinerja jumlah draft revisi anggaran eksteral.

Terlaksananya kegiatan di Bagian Perencanaan dan Program-Biro PKT sangat mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi lingkup Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, sesuai tugas fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional. Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Bagian Perencanaan dan Program-Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Kepala Bagian Perencanaan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purnawarman

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Deni Nugraha

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua

M. Deni Nugraha

Jakarta, Maret 2018

Pihak Pertama

Agus Purnawarman



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan perencanaan dan monitoring evaluasi anggaran	1 Jumlah draft Renja BSN	1 Dokumen
	2 Jumlah draft Laporan Kinerja BSN (BSN, Sestama, Biro PKT)	3 Laporan
	3 Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN (BSN, Ess 1 - IV)	1 Dokumen
	4 Jumlah draft Laporan Monev BSN (monev bulanan dan triwulanan)	16 Laporan
	5 Jumlah draft revisi IKU/Renstra BSN	1 Dokumen
2 Meningkatkan pengelolaan anggaran yang akurat dan akuntabel	6 Jumlah draft DIPA BSN	1 Dokumen
	7 Jumlah draft revisi anggaran eksternal	4 Dokumen

Output
1 Layanan Perencanaan

Anggaran (Rp.)
2,319,411,000

Pihak Kedua


M. Beni Nugraha

Jakarta, Maret 2018
Pihak Pertama


Agus Purnawarman